

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mempengaruhi kelangsungan pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama yang harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan dalam penerapan kedua prinsip tersebut di tingkat pemerintah daerah masih cukup besar.

Kabupaten Pinrang, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Sebelum penerapan digitalisasi, pengelolaan keuangan sering kali dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta keterlambatan dalam pelaporan. Digitalisasi pengelolaan keuangan, khususnya melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. SIPD dirancang untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Namun, penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Pinrang masih menemui berbagai kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan pengguna, serta masalah integrasi data antara sistem yang lama dan sistem yang baru. Sedangkan kendala non-teknis meliputi resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai pemerintah, minimnya komitmen dari para pemangku kepentingan, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi sistem ini.



Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan platform wajib yang digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD sering kali tidak berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kesiapan pengguna dan lingkungan kerja yang mendukung.

Selain itu, penerapan aplikasi SIPD sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan data yang diinput valid dan akurat. Fenomena ini kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem. Data yang tidak akurat dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang salah oleh pemerintah daerah. McKinsey & Company (2021) menyebutkan bahwa validasi data adalah salah satu elemen kunci dalam keberhasilan transformasi digital, terutama dalam sektor pemerintahan.

Dalam konteks transparansi, aplikasi SIPD sebenarnya menawarkan fitur-fitur yang mempermudah akses informasi keuangan daerah, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Namun, sejauh mana fitur-fitur tersebut dimanfaatkan masih menjadi tanda tanya besar. Menurut Luthfia (2022), salah satu kendala utama dalam penerapan transparansi melalui teknologi digital adalah minimnya literasi teknologi di kalangan pegawai pemerintahan dan masyarakat.

Sementara itu, tantangan lain yang muncul adalah terkait dengan keamanan data. Dengan semakin banyaknya informasi keuangan yang tersimpan dalam sistem digital, risiko terhadap kebocoran data atau peretasan semakin tinggi. Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan data dalam sistem pemerintahan harus didukung oleh

struktur keamanan siber yang kuat untuk mencegah potensi ancaman



Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun digitalisasi pengelolaan keuangan, termasuk melalui SIPD, menawarkan berbagai potensi manfaat, keberhasilannya tidak dapat dijamin tanpa adanya upaya yang serius untuk mengatasi tantangan yang ada. Dalam konteks ini, aplikasi SIPD diposisikan sebagai variabel moderasi karena ia memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara digitalisasi dan transparansi dengan pengelolaan keuangan daerah.

Variabel moderasi ini penting untuk diteliti karena SIPD tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurut Rogers (2021), teknologi hanya akan berhasil jika disertai dengan komitmen organisasi untuk mengadopsi perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang peran SIPD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang dengan mempertimbangkan aplikasi SIPD sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah agar implementasi SIPD dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah Digitalisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang?
- 2) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang?
- 3) Apakah Aplikasi SIPD dapat memperkuat hubungan



ngan Pemerintah Kabupaten Pinrang jika dimoderasi Aplikasi

?

ah Digitalisasi dan Transparansi dapat memperkuat
ngan

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang jika dimoderasi Aplikasi SIPD?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 2) Menganalisis pengaruh penerapan transparansi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 3) Menganalisis pengaruh Aplikasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang jika dimoderasi Aplikasi SIPD.
- 4) Menganalisis pengaruh digitalisasi dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang jika dimoderasi Aplikasi SIPD.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dari penelitian dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara digitalisasi, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPD sebagai variabel moderasi.
- 2) Penelitian ini mengusulkan model konseptual baru yang menggambarkan peran aplikasi SIPD dalam memperkuat hubungan antara digitalisasi dan transparansi dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik terkait penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.



1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait digitalisasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat aplikasi SIPD, pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki infrastruktur, pelatihan, dan regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.
2. Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pengelola aplikasi SIPD untuk meningkatkan fitur dan penggunaannya sesuai kebutuhan daerah. Temuan ini juga membantu penyedia aplikasi untuk memperbaiki desain teknis SIPD agar lebih mudah digunakan dan relevan dengan tantangan di lapangan, sehingga aplikasi dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung transparansi dan digitalisasi.
3. Penelitian ini memberikan arahan kepada instansi pemerintah untuk fokus pada pengembangan kompetensi pegawai, khususnya dalam penggunaan teknologi seperti aplikasi SIPD. Pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih terarah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengelola informasi keuangan secara transparan dan digital, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pengelolaan keuangan yang baik.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Digitalisasi

Digitalisasi merupakan transformasi fundamental dalam dunia modern yang telah mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Secara sederhana, digitalisasi mengacu pada proses konversi atau pengolahan informasi ke dalam format digital. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengotomatisasi proses, mempercepat aliran informasi, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan.

Menurut Klaus Schwab, pendiri dan ketua Forum Ekonomi Dunia, "Digitalisasi bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang perubahan budaya dan organisasi untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal". Pada tingkat pemerintahan, digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya.

Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi telah mengubah cara pelayanan publik diselenggarakan. Menurut data dari International Telecommunication Union (ITU), "Penerapan teknologi digital telah memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif kepada warga negara mereka". Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif seperti pelayanan e-government, yang memanfaatkan platform digital untuk menyediakan informasi dan layanan publik secara online.

Penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan juga menghadirkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan transparansi. Sebagaimana disampaikan oleh World Bank, "Digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dengan memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan". Ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam pemantauan penggunaan dana publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.



demikian, perubahan menuju pemerintahan digital tidak selalu mudah. Tantangan seperti infrastruktur yang belum matang, kurangnya

keterampilan digital di kalangan pegawai pemerintah, dan kekhawatiran akan keamanan data menjadi hambatan utama dalam implementasi digitalisasi. Sebagaimana disoroti dalam studi oleh McKinsey & Company (2019), "Pemerintah perlu mengatasi tantangan ini dengan memperkuat infrastruktur digital mereka dan meningkatkan literasi digital di kalangan pejabat publik".

Penerapan digitalisasi dalam pemerintahan juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Menurut laporan dari OECD, "Automatisasi proses administratif dan penggunaan analisis data dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan". Hal ini membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dan memperbaiki kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Selain itu, digitalisasi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi antarinstansi dan mengintegrasikan sistem-sistem yang berbeda di dalam pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bappenas, "Penggunaan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan meningkatkan interoperabilitas sistem, yang esensial dalam pengambilan keputusan yang berbasis data". Di sisi lain, perubahan budaya organisasi juga menjadi kunci kesuksesan dalam penerapan digitalisasi di pemerintahan. Sebagaimana disampaikan oleh John Kotter (2020), seorang pakar manajemen perubahan, "Pemerintah perlu mengubah budaya organisasi mereka untuk menjadi lebih terbuka terhadap inovasi, lebih responsif terhadap perubahan teknologi, dan lebih orientasi pada hasil". Ini mencakup pengembangan kapasitas pegawai untuk menghadapi perubahan teknologi dan mengadopsi praktik manajemen yang lebih adaptif.

Penerapan digitalisasi juga menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan implikasi etis dan sosial dari teknologi baru. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan administratif dapat menimbulkan pertanyaan tentang privasi data dan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ellen Broad (2019), seorang pakar kebijakan data, "Pemerintah



ikan bahwa keputusan berbasis AI dilakukan dengan transparan, dan mempertimbangkan dampak sosial yang luas".

itu, digitalisasi juga memperluas akses informasi dan layanan publik ke tingkat, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Menurut Penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan pemerintah untuk

menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya kepada warga negara yang sebelumnya sulit dijangkau".

Namun demikian, tantangan terkait inklusi digital tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan UNDP, "Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta di antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, perlu diperhatikan dalam upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat memanfaatkan manfaat dari digitalisasi pemerintahan".

Secara keseluruhan, digitalisasi telah mengubah lanskap pemerintahan modern dengan menyediakan berbagai peluang dan tantangan. Bagi pemerintah daerah seperti Kabupaten Pinrang, penerapan teknologi informasi, termasuk melalui aplikasi SIPD, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan transparansi, dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan memahami dinamika digitalisasi secara menyeluruh, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi dalam pengelolaan keuangan publik dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

2.1.2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan yang mengacu pada ketersediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Institute of Development Studies, "Transparansi adalah dasar dari akuntabilitas publik, yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah".

Di dalam konteks pemerintahan, transparansi mencakup pengungkapan informasi mengenai kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan. Menurut Transparency International, "Transparansi membantu mencegah korupsi dengan mengekspos praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal dalam penggunaan sumber daya publik".



pan transparansi juga melibatkan komitmen untuk memberikan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti kepada publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Open Government Partnership, "Pemerintahan yang transparan memberikan akses terhadap informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan". Dalam konteks

global, transparansi dianggap sebagai unsur kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, menurut World Resources Institute, "Transparansi mengurangi risiko keputusan yang tidak efektif atau tidak berkelanjutan dengan memastikan informasi yang relevan dan akurat tersedia untuk semua pihak yang terlibat".

Namun, untuk mencapai transparansi yang efektif, diperlukan kerangka hukum yang kuat dan sistem administrasi yang memadai. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan OECD, "Pemerintah perlu mengadopsi standar pelaporan yang jelas dan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi untuk memastikan transparansi yang konsisten dalam semua aspek operasional mereka".

Pentingnya transparansi juga ditekankan dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Menurut IMF, "Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat disiplin fiskal, dan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal". Di samping itu, transparansi bukan hanya tentang pengungkapan informasi secara pasif, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Menurut UNDP, "Pemerintahan yang transparan merangsang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah."

Tantangan utama dalam mewujudkan transparansi adalah ketersediaan data yang berkualitas dan mudah diakses. Sebagaimana dikemukakan oleh World Bank, "Keterbukaan informasi hanya bermanfaat jika data yang tersedia dapat dipercaya dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan". Penggunaan teknologi informasi juga berperan penting dalam mendukung transparansi pemerintahan. Menurut McKinsey & Company, "Teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan akses real-time terhadap informasi keuangan dan kinerja organisasi mereka kepada publik".

Namun, transparansi juga memiliki batas-batasnya, terutama terkait dengan privasi individu dan keamanan nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Center for International Studies, "Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara transparansi untuk mempromosikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap sifit". Keberhasilan transparansi dalam pemerintahan juga tergantung organisasi yang mendukung, di mana keterbukaan dihargai dan transparansi diintegrasikan dalam setiap aspek kegiatan



pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan dalam studi oleh European Commission, "Penerapan transparansi dalam pemerintahan memerlukan perubahan budaya organisasi yang mendalam untuk menciptakan lingkungan di mana informasi dapat dibagi dengan mudah dan dengan keyakinan penuh".

Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, transparansi juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan internasional. Menurut UN Global Compact, "Pemerintahan yang transparan membantu memperkuat reputasi nasional dan mendukung kerja sama antarbangsa yang efektif dalam masalah-masalah global". Secara keseluruhan, transparansi merupakan prinsip yang penting dalam membangun pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan memastikan informasi yang jelas dan aksesibel, pemerintah dapat memperkuat legitimasi mereka, meningkatkan partisipasi publik, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan

Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1).



Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020:11) manajemen dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Jatmiko (2017:1) dan ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan)

berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya (2017:2) ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

2.1.4. Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi berbagai kegiatan administrasi dan keuangan di tingkat daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi SIPD diharapkan mampu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai aplikasi SIPD:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019

Menurut Permendagri ini, SIPD merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan daerah secara terintegrasi dan transparan. SIPD dirancang untuk menyederhanakan prosedur administrasi, memastikan data yang akurat, serta mempermudah proses pengawasan dan pelaporan keuangan daerah. Permendagri ini menekankan pentingnya implementasi SIPD dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah.

2. Rahayu dan Pratama (2020)

Rahayu dan Pratama mengungkapkan bahwa SIPD memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai sistem informasi yang ada di pemerintah daerah, sehingga memungkinkan integrasi data yang lebih efisien. Aplikasi SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai unit pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang terencana. Dengan adanya SIPD, laporan keuangan menjadi lebih cepat dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.



3. **Mardiasmo(2020)**

Mardiasmo berpendapat bahwa salah satu tujuan utama dari pengembangan aplikasi SIPD adalah untuk memperkuat pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time dan meminimalisir potensi penyimpangan atau korupsi. Menurutnya, dengan SIPD, seluruh tahapan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi, yang meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

4. **Suryanto(2021)**

Suryanto menjelaskan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat untuk mempercepat proses administrasi keuangan dan laporan, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan mengintegrasikan seluruh data dalam satu sistem, SIPD meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya pemerintah daerah. Namun, menurutnya, tantangan terbesar dalam implementasi SIPD adalah bagaimana memastikan bahwa semua pengguna memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi yang intensif sangat penting untuk kesuksesan penggunaan SIPD.

5. **Setiawan(2022)**

Setiawan menyoroti pentingnya peran aplikasi SIPD dalam menjawab kebutuhan akan transparansi publik. Dengan akses yang terbuka bagi masyarakat mengenai laporan keuangan dan anggaran daerah, SIPD memfasilitasi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurut Setiawan, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait anggaran dan pembangunan daerah.



Konsep Umum Tentang Aplikasi SIPD:

- **Integrasi Data:** SIPD bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai data administratif dan keuangan daerah ke dalam satu sistem yang mudah diakses dan dikelola. Integrasi ini memudahkan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, serta memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan adalah data yang akurat dan terkini.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Salah satu tujuan utama dari penerapan SIPD adalah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran, belanja, dan penggunaan dana daerah, yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.
- **Efisiensi dan Kecepatan:** Aplikasi SIPD memungkinkan proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi lebih cepat dan efisien. Proses pengelolaan anggaran dan pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih terstruktur, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi.
- **Pengawasan dan Evaluasi:** SIPD memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat dan masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran daerah dengan lebih transparan, yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran atau korupsi.
- **Peningkatan Partisipasi Publik:** Dengan adanya fitur akses terbuka dalam aplikasi SIPD, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan anggaran daerah. Ini juga menciptakan rasa kepemilikan publik terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Aplikasi SIPD bukan hanya alat administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Sebagai sistem yang dirancang untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah, SIPD memberikan kemudahan



dalam hal integrasi data, transparansi, dan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pinrang dan daerah lainnya di Indonesia.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Minta Indah Laoli Ayler B. Ndraha Yasminar Telaumbanua (2022)	Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penggangan)	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan daerah seperti yang dilakukan oleh kabupaten Tanah Datar tersebut telah mampu meningkatkan PAD Kabupaten Nias dengan sumber daya alam yang cukup minim. Walaupun Cash Management yang menjadi andalan Kabupaten Nias dalam meningkatkan PAD-nya ternyata banyak menyisakan masalah yang tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat disana.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
2	Kamila Luthfia Yahya, Iswary Amalia, Lies Nurhaini (2023)	Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dokumen keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo masih dilakukan secara manual yaitu dengan mendistribusikan dokumen secara hardfile sehingga kinerja yang dihasilkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKPAD masih kurang efektif dan efisien. Kendala yang kami temui pada sistem kerja manual proses pencarian dokumen keuangan yang tidak efisien karena membutuhkan banyak waktu serta dokumen tersebut rentan hilang.
3	Merlyn Delly Rumondor, Jantje J. Tinangon, Heinke R. N. Pokas (2023)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam	Hasil penelitian membuktikan Implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah adalah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi secara paralel yakni FMIS dan SIPD Untuk tahapan pelaksanaan penatausahaan melalui FMIS kemudian dilakukan perekaman transaksi yang telah direalisasikan SP2D ke SIPD.
4	Andi Hunairah Rezkiaty, Syamsu Alam, Tenriwaru (2024)	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1. Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah daerah) di Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan telah dilakukannya penerapan sejak tahun 2020 setelah aturan ditetapkan pada tahun 2019;



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			<p>2. Hambatan yang dialami didalam Implementasi yaitu terdapatnya sistem system erros pada aplikasi, fitur-fitur yang tersedia tidak mencakup aturan pelaporan yang berlaku, banyaknya menu- menu pada sistem tidak bisa diakses, tidak dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, respon pemerintah pusat yang dianggap kurang cepat didalam pelayanan keluhan aplikasi.</p> <p>3. Kurangnya SDM atau Sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi SIPD baik dari Pusdatin itu sendiri maupun di Kabupaten Bulukumba.</p>
5.	Keisyah Sabinatullah Qur'aini (2024)	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Berbasis Web Server	Dari penelitian ini kita mendapatkan informasi mengenai IP Address, Sistem Operasi dan juga gambar struktur topologi website SIPD dengan menggunakan tools dan



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			<p>beberapa langkah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai website SIPD. Misalnya mengecek IP Address menggunakan Command Prompt, mengecek web server menggunakan Kali Linux dan menggambar topologi web menggunakan Cisco. Melalui pemahaman terhadap implementasi web server dalam konteks SIPD, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja sistem website SIPD.</p>
6	Agustinus Salle (2017)	Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal (warga masyarakat), Transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai</p>



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			kinerja keuangan pemda, meningkatkan pengawasan, dan partisipasi warga dalam pembangunan, Transparansi telah diatur dalam sejumlah regulasi dan perlu mendapat diperhatikan dan dipatuhi pemerintah daerah, Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
7	Gerryan Putra (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketidakadanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka pengelolaan keuangannya akan baik pula. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolaannya baik, maka akan baik pula pengelolaan keuangan suatu SKPD
8	Lucy Auditya, Husaini, Lismawati (2013)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.
9	Erwinton Putra Antonius Tarigan Lastria	Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
	Nurtanzila (2013)	dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	terutama dalam hal informasi aset pemerintah, hal ini didukung responden. Mereka seluruhnya yakin akan akuntabilitas aset melalui basis akrual, tetapi dengan kondisi permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta, penerapan ini dapat mempersulit pegawai sehingga tujuan akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat menjadi tidak tercapai.
10	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			<p>baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga good governance dan clean government akan terwujud di pemerintahan Kota Ambon.</p>

